

PERAN ASEAN DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN UNCLOS 1982

Oleh

Ivan Putra Lesmana, NIM 1714101076

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) sengketa yang terjadi di Laut China Selatan dalam perspektif hukum internasional dan (2) peran ASEAN dalam menangani dan menyelesaikan Sengketa di Laut China Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual pproach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Metode pencarian data yang dilakukan adalah library research, yaitu pada kepustakaan sebagai landasan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) konflik di kawasan perairan Laut China Selatan tak luput dari historis atau sejarah dari kawasan perairan itu sendiri, yang mana kawasan tersebut sudah terkenal potensial sejak negara bangsa belum terebentuk. Kawasan perairan Laut China Selatan sudah terkenal sejak lama sebagai jalur utama pelayaran, yang menjadikan kawasan perairan tersebut objek perebutan kekuasaan, sehingga menjadikan kerajaan atau negara yang menguasainya mendapat benefit yang luar biasa. Dan juga karena alasan historis tersebut China mengklaim bahwa kawasan perairan Laut China Selatan adalah termasuk kekuasaan China, batas kekuasaan tersebut dinamakan *Nine Dash Line*, ini yang menyebabkan ketegangan semakin menjadi karena China mengklaim tanpa dasar hukum. (2) ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi kawasan Asia Tenggara tentu mempunyai sebuah kewajiban yaitu mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara, tentu mempunyai strategi tertentu untuk menyelesaikan permasalahan kawasan Laut China Selatan yaitu dengan menggunakan cara ASEAN Way, yang menyelesaikan permasalahan lebih kearah diplomasi preventif, yang lebih komunikatif sehingga lebih ke pendekatan antar individu.

Kata kunci: Laut Cina Selatan, Unclos 1982, ASEAN

ASEAN'S ROLE IN THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT BASED ON UNCLOS 1982

By

Ivan Putra Lesmana, NIM 1714101076

Law Departement

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing (1) the disputes that occurred in the South China Sea in the perspective of international law and (2) the role of ASEAN in handling and resolving disputes in the South China Sea. In this study using normative legal research. The approaches applied are statutory approaches, case approaches and conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials as a basis for analysis. The data search method used is library research, namely the library as a foundation. Based on the results of the research obtained, it shows that (1) conflicts in the waters of the South China Sea cannot be separated from the history of the waters themselves, which have been known to have potential since the nation state was not yet formed. The waters of the South China Sea have been known for a long time as the main shipping lane, which has made the waters the object of power struggles, thereby giving the kingdom or country that controls them great benefits. And also because of these historical reasons China claims that the waters of the South China Sea belong to China's control, this limit of power is called the Nine Dash Line, this is what causes tensions to escalate because China claims without any legal basis. (2) ASEAN as a regional organization that oversees the Southeast Asian region certainly has an obligation that is to integrate the Southeast Asian region, of course it has a certain strategy to solve problems in the South China Sea region, namely by using the ASEAN Way, which solves problems more towards preventive diplomacy, which is more communicative so that it is more of an interpersonal approach.

Keywords: *South China Sea, Unclos 1982 , ASEAN*